

STUDI FEMINISME TERHADAP PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DI INDIA

Suci Lukitowati, Lucky Reza, Agita Pratiwi, Nurul Awaliyah
Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Tanjungpura
Prodi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Tanjungpura

Email korespondensi: lukitowati@yahoo.co.id

Abstrak

India merupakan negara berkembang yang berada di kawasan Asia Selatan dengan jumlah penduduk terbesar kedua didunia setelah China dan dikenal sebagai semenanjung terbesar di dunia karena luas wilayahnya. India sangat terkenal dengan industri hiburan sekaligus menjadi salah satu pusat teknologi terbaik didunia saat ini. Meskipun negara berkembang, infrastruktur pembangunan India mulai meningkat, masyarakat kelas menengah india meningkatkan pendidikan untuk membantu mendorong perekonomian dengan kreativitas masyarakat India. Kekuatan keamanan militer India juga tidak kalah kuat dengan negara superpower, dikarenakan jumlah pasukan militer yang besar. Salah satu poin penting yang dimiliki militer India yaitu memiliki Nuklir. Dibalik kesuksesan yang telah diraih, India tercatat sebagai salah satu negara dengan tingkat pelanggaran HAM tertinggi didunia khususnya pada wanita. Bentuk pelanggaran HAM yang telah terjadi di India yaitu : 1) Prostitusi, 2) Diskriminasi, 3) Perjudian. Kasus ini menimbulkan pertanyaan mengapa adanya pelanggaran HAM terhadap wanita di India?. Untuk menjawab rumusan masalah tersebut penulis menggunakan metode pendekatan feminisme karena penulis menganggap metode tersebut lebih dominan dan relevan terhadap kasus yang dibahas. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan teknik studi literatur dengan memanfaatkan buku, jurnal ilmiah, serta sumber data yang valid sebagai sumber referensi. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa kasus pelanggaran HAM di India khususnya kepada kaum wanita masih terjadi dan menjadi masalah hingga saat ini. Hal ini dibuktikan dengan masih berlakunya praktek prostitusi, meningkatnya angka pemerkosaan, dan masih membudayanya perjudian secara paksa sehingga meningkatkan kasus *dowry murder* (pernikahan hanya dianggap sebagai prostitusi legal yang bertujuan untuk menaikkan kasta wanita), hal inilah yang menjadi pemicu meningkatnya kasus pembunuhan kepada wanita. Selain itu, adanya tekanan psikologis yang dirasakan oleh wanita juga menjadi faktor pemicu tingginya angka kematian akibat kasus bunuh diri.

Kata Kunci : *Pelanggaran HAM, Prostitusi, Diskriminasi, Perjudian, Tradisi.*

PENDAHULUAN

India adalah negara berkembang di kawasan Asia Selatan yang merupakan negara dengan tingkat kemajuan dalam bidang ekonomi, teknologi maupun militernya yang cukup tinggi dan perpolitikan Internasional India memiliki pengaruh yang cukup besar di dunia.¹ India juga merupakan negara yang kaya akan budaya, seperti yang dapat kita lihat dalam dunia perfilman yang menampilkan kekayaan budaya yang mereka miliki seperti

gastro diplomasi² (tradisi berpakaian maupun kulinernya). Namun dibalik semua kesuksesan yang diraih oleh India seperti kemajuan ekonomi, teknologi, militer, kemajuan industri hiburan serta perkembangan gastro diplomasi yang semakin gencar dipromosikan oleh pemerintah India, ternyata India masih memiliki tanggung jawab yang besar yang masih menjadi tantangan bagi India untuk mensejahterakan masyarakatnya, khususnya dalam menangani kesenjangan gender terhadap kaum wanita. Kasus kesenjangan gender yang terjadi di india menimbulkan beberapa fenomena yang

¹ Rosfita Walanda Sitorus. 2012. *Praktek Diskriminasi Wanita Karena Budaya Di India*. Hal 1

²

menyita perhatian dunia internasional, antara lain; 1) Diskriminasi; 2) Prostitusi Ilegal; 3) Pelanggaran HAM; 4) Pengangkatan rahim secara paksa; 5) Perjudohan; 6) Dowry murder. Dari beberapa fenomena kasus kriminalitas terhadap wanita di India, penulis memfokuskan pada studi kasus dowry murder. Dowry murder adalah pemberian yang diberikan oleh pengantin wanita kepada pihak pengantin laki-laki ketika menikah. Yang jika diartikan dalam bahasa Indonesia dowry adalah mahar, namun perbedaannya di Indonesia mahar diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak wanita dengan rasa kasih sayang terhadap pasangan. Sedangkan di India berbanding terbalik.

Tulisan ini terbagi menjadi tiga poin yaitu; 1) Budaya India; 2) dowry death; 3) Kebijakan pemerintah dan gerakan masyarakat, dimana masing-masing poin akan dipaparkan dalam tulisan ini.

METODELOGI

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode pendekatan feminisme karena penulis menganggap metode tersebut lebih dominan dan relevan terhadap kasus yang dibahas. Feminisme adalah murni mengedepankan aspek kesamarataan peran dan hak dalam mengaktualisasikan diri sebagai kebutuhan manusia yang paling puncak. Kesamarataan tersebut mencakup bidang politik, ekonomi, budaya, ideologi dan lingkungan".³ Dalam penulisan ini, penulis menggunakan teknik studi literatur dengan memanfaatkan buku, jurnal ilmiah, serta sumber data yang valid sebagai sumber referensi.

Budaya India

Budaya merupakan sesuatu yang berharga dan penting bagi suatu negara yang menjadi dasar dalam membentuk suatu identitas

nasional. India merupakan salah satu negara yang memiliki beragam budaya positif yang menjadi perhatian dunia. India memiliki salah satu budaya perjodohan dimana wanita yang membayar laki-laki. Perjudohan ini memiliki tujuan yang baik dimana Ayah dari pihak perempuan menjodohkan anaknya agar anaknya terjaga aman dan dilindungi oleh calon suaminya. Perjudohan ini dinamakan Dowry Murder namun karena adanya ketimpangan sosial dan ekonomi. Dari keanekaragaman budaya yang dimiliki oleh India, perjodohan salah satu budaya yang bersifat negatif sehingga menimbulkan tindakan kriminal yaitu Dowry Murder. Dowry Murder adalah pembunuhan terhadap perempuan karena tidak memberikan atau membawa maskawin yang cukup sesuai dengan permintaan keluarga laki-laki. Dowry murder sebagai sebuah fenomena baru muncul di akhir tahun 1980-an dan semakin lama semakin mengalami peningkatan hingga saat ini.⁴ Tujuan awal Dowry Murder yaitu, sebuah harapan seorang ayah dari pihak perempuan agar anaknya dapat dilindungi dan tidak adanya kekerasan yang dilakukan oleh calon suami melalui mahar yang diberikan oleh pihak perempuan.⁵

Adanya ketimpangan sosial dan ekonomi di India membuat tujuan awal yang ingin dicapai oleh Dowry Murder tidak sesuai dengan yang diharapkan. Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh National Crime Records Bureau India, pada tahun 2006 sebanyak 2.276 perempuan melakukan bunuh diri akibat masalah maskawin yang diinginkan oleh pihak laki-laki tidak mampu dipenuhi oleh pihak wanita.⁶ Ketidakmampuan dalam memenuhi mahar menimbulkan tekanan terhadap pihak

³ Sammy Tyar Amandha. Pemikiran Feminisme dalam Hubungan Internasional. Diakses dari https://www.academia.edu/3404285/Pemikiran_Feminisme_dalam_Hubungan_Internasional pada 30 Maret 2017 pukul 17:44

⁴ Resen, Ranteallo. 2012. *Dowry Murder: Kekerasan Simbolik terhadap Perempuan di India*. Volume 7 hal:1.

⁵ Lefi Alifia. 2017. *Kekerasan Terhadap Perempuan di Daerah Kumuh India*. Diakses dari www.doktermudaonpublichealth.com pada 21 Maret 2017 pukul 23.06 WIB.

⁶ Resen, Ranteallo. 2012. *Dowry Murder: Kekerasan Simbolik terhadap Perempuan di India*. Volume 7 hal:1.

wanita sehingga timbul rasa putus asa. Tindakan yang sering dilakukan oleh laki-laki terhadap wanita (istri) dengan cara menyiram minyak tanah ke tubuh wanita didapur kemudian dibakar. Hal ini dilakukan untuk menghilangkan jejak adanya penyiksaan fisik sehingga tidak mencurigakan karena pakaian sari yang digunakan oleh wanita terbuat dari bahan yang mudah terbakar.⁷

Tahun 2002 merupakan awal perubahan tujuan baik dari *Dowry Murder* yang membuat orangtua dan wanita muda India tertekan dan ketakutan, orangtua pihak wanita memaksa diri untuk menyiapkan biaya dalam memenuhi mahar calon suami anak perempuannya sehingga kebutuhan primier wanita muda India seperti pendidikan, kesehatan tidak terpenuhi.⁸

Dowry Death

Dowry murder merupakan induk kriminalitas terhadap wanita di India sehingga menimbulkan arti baru yaitu dowry death. Dowry Death atau mahar kematian merupakan dampak dari ketidak sesuaian tujuan awal yang ingin dicapai oleh *dowry murder*.

Sebelum menikahkan anaknya, Ayah dari pihak wanita muda India mempersiapkan biaya mahar dengan menggunakan cara-cara yang tidak lazim sehingga berdampak pada pelanggaran HAM dan meningkatkan kriminalitas. Beberapa cara yang dilakukan oleh ayah dari pihak wanita dalam usahanya untuk memenuhi mahar tersebut yaitu menculik wanita muda lainnya dan diperkosa kemudian organ tubuh wanita tersebut diambil dan dijual untuk menghasilkan uang guna memenuhi mahar anaknya nanti. Ketika mahar sudah

terpenuhi dan pernikahan sudah berlangsung, namun keluarga dari pihak laki-laki sering merasa tidak cukup dengan mahar yang telah diberikan oleh pihak wanita, sehingga keluarga dari pihak laki-laki meminta tambahan lagi dari mahar yang telah diberikan sebelumnya.

Apabila mahar tambahan yang diminta tidak terpenuhi, kerap kali suami maupun keluarganya melakukan tindak kekerasan dan melakukan tindak *human trafficking* terhadap istrinya dengan melakukan prostitusi ilegal. Hal ini menyebabkan banyak para wanita yang hamil bukannya hasil pernikahannya dan meningkatkan kasus aborsi. Wanita yang bertahan dan rela diperlakukan secara tidak manusiawi oleh suaminya karena tidak ingin diceraikan oleh suaminya, karena pandangan masyarakat seorang wanita yang tidak memiliki suami (janda) dipandang rendah dan hina.

Dari kasus kriminalitas yang terjadi terhadap wanita di India seperti penculikan, pemerkosaan, pembunuhan, perjudian, *human trafficking*, prostitusi ilegal, dan aborsi, penyebab utamanya adalah tradisi India yang disalah gunakan yaitu dari “dowry murder”.

Kriminal-kriminal yang didapatkan baik perempuan India maupun wisatawan seperti pemerkosaan sering terjadi dan meningkatkan tingkat pemerkosaan di India semakin meningkat setiap tahunnya.

Paradigma Feminisme dalam Kasus Dowry Murder di India dan Gerakan Masyarakat

Feminisme adalah sifat keperempuanan, sehingga feminisme diawali oleh persepsi tentang ketimpangan posisi perempuan dibanding laki-laki di masyarakat.⁹ Akibat persepsi ini, timbul berbagai upaya untuk mengkaji penyebab ketimpangan tersebut untuk mengeliminasi dan menemukan formula penyetaraan hak perempuan dan laki-laki dalam

⁷ Namratha. S Ravikant. “Dowry Deaths: Proposing A Standard for Implementation of Domestic Legislation In Accordance with Human Rights Obligations”, *Michigan Journal of Gender and the Law*, Vol. 6 (2). (2000: 456).

⁸ C.S. Lakshmi. “On Kidneys and Dowry”, *Economic and Political Weekly*, Vol.24 (January 1989) <<http://www.jstor.org/stable/4394309>> (diakses 22 Maret 2017 pukul 20.38 WIB). (1989:189).

⁹ Susanti. 2014. Diakses digilib.uinsby.ac.id/544/6/Bab%203.pdf pada 26 Maret 2017 pukul 17:45

segala bidang, sesuai dengan potensi mereka sebagai manusia (*human being*).¹⁰

Feminisme memandang bahwa dalam kasus dowry murder tindakan pelanggaran HAM pada wanita tidak dapat ditolerir, karena nilai budaya dowry murder dijadikan suatu kebenaran dalam melakukan kekerasan terhadap wanita.¹¹ Feminisme menganggap bahwa penyimpangan tujuan awal dari budaya dowry murder pada era modern menjadi pemahaman yang turun-temurun.

Meningkatnya dowry murder membuat pemerintah India mengeluarkan kebijakan penghapusan dowry murder dengan membuat undang-undang yang diberi nama *Dowry Prohibition Act 1961* yang intinya adalah melarang sistem pernikahan dengan dowry dan mengajak masyarakat India untuk menikah berdasarkan cinta (*gandava wiwaha*).¹²

Tabel 1: Data-Data Dalam Kasus Dowry Murder di India

Tahun	Jumlah	Tahun	Jumlah
1991	5157	2001	6851
1992	4962	2002	6822
1993	5817	2003	6208
1994	4935	2004	7026
1995	4811	2005	6989
1996	6006	2006	7618
1997	6000	2007	8093
1998	6975	2008	8172
1999	6699	2009	8533
2000	6995	2010	8391

Sumber : National Crime Record Bureau, India

Tabel 2 : Data Kasus Bunuh Diri Di India

Tahun	Kasus Bunuh Diri
2008	3038
2009	2921
2010	3093

Sumber: National Crime Record Bureau, India

Dari data yang didapat dapat disimpulkan bahwa kasus dowry murder meningkatkan banyak sekali catatan kriminal yang meningkat setiap tahunnya. Komponen utama *Dowry Prohibition Act 1961* adalah larangan untuk memberikan dan menerima dowry dalam pernikahan serta hukuman penjara yang tidak kurang dari 5 tahun bagi mereka yang memberi dan menerima dowry (S.V,1984).¹³

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam mengatasi kasus Dowry Murder, salah satunya dengan menetapkan UU Dowry Prohibition Act. Namun, dalam pelaksanaan kebijakan tersebut belum dapat mengatasi secara efektif, maka dari itu Pemerintah India melakukan Amandemen terhadap UU sebelumnya. Terdapat dua amandemen yang telah dilakukan oleh Pemerintah India, antara lain:

“Amandemen pertama pada tahun 1983 bertujuan untuk mengkriminalisasikan kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap seorang istri (Gangoli,2007;.) Dalam amandemen ini, pelaku kekerasan yang terbukti bersalah akan dikenai hukuman denda dan penjara sampai dengan 3 tahun. Amandemen kedua pada tahun 1986 dikenal sebagai Dowry Death Statute yang mewajibkan adanya investigasi terhadap kasus kematian perempuan yang mencurigakan dalam jangka waktu

¹⁰ Ibid

¹¹ Resen, Ranteallo. 2012. *Dowry Murder: Kekerasan Simbolik terhadap Perempuan di India*. Volume 7 hal:31

¹²Putu Titah Kawitri Resen. 2012. *Kekerasan Terhadap Perempuan dan Keamanan Manusia (Studi kasus: Dowry Murder Di India)*. Hal 16

¹³ Ibid. Hal 16

7 tahun perkawinannya. Di tahun 2005, pemerintah India mengeluarkan sebuah undangundang baru yang disebut dengan *Domestic Violence Avct 2005*. Undang-undang ini tidak hanya bertujuan melindungi perempuan dari kekerasan akibat dowry, namun juga melindungi perempuan dari kekerasan *domestic* lainnya seperti fisik, mental, emosional, ekonomi dan seksual.”¹⁴

Pemerintah India telah mengeluarkan kebijakan yang berkaitan dengan teori feminisme dalam mengatasi dowry murder di India. Namun dalam pengaplikasian di lapangan pemerintah menghadapi berbagai hambatan dan tantangan. Hambatan yang dihadapi yaitu; tidak ada satu pihakpun yang mengajukan gugatan atas tradisi ini dan oleh banyak pihak, undang-undang dianggap sebagai *toothless bill* karena tidak benar-benar mampu menghancurkan praktek dowry di masyarakat.¹⁵ Investigasi yang dilakukan oleh petugas kepolisian sebagaimana yang disyaratkan undang-undang seringkali tidak berhasil membawa pelaku kekerasan ke dalam penjara. Kekerasan terhadap perempuan masih dianggap sebagai sebuah pemandangan sehari-hari dan bukanlah sebuah “kasus” khusus yang memerlukan penyelidikan mendalam.¹⁶

Tantangan dalam menghadapi kasus dowry murder yang terjadi di India ini telah menyita perhatian dunia Internasional. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) dan *The Declaration forThe Elimination of Violence Against Women* (CEDAW). India sebagai salah satu negara demokrasi yang besar, secara otomatis terikat kepada hukum kebiasaan internasional tersebut dan pada tanggal 9 Juli 1993 India telah meratifikasi CEDAW.¹⁷

CEDAW (*The Declaration forThe Elimination of Violence Against Women*) merupakan suatu instrument standar internasional yang diadopsi oleh PBB pada tahun 1979 dan mulai berlaku pada 3 Desember 1981. Pada tanggal 18 Maret 2005, 180 negara dengan lebih dari 90% negara-negara anggota PBB merupakan negara peserta konvensi.¹⁸ CEDAW menetapkan secara universal prinsip-prinsip persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Konvensi menetapkan persamaan hak untuk perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, disemua bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan sipil. Konvensi mendorong diberlakukannya perundang-undangan nasional yang melarang diskriminasi dan mengadopsi tindakan-tindakan khusus sementara untuk mempercepat kesetaraan de facto antara laki-laki dan perempuan, termasuk merubah praktek-praktek kebiasaan dan budaya yang didasarkan pada inferioritas atau superioritas salah satu jenis kelamin atau peran stereo tipe untuk perempuan dan laki-laki.¹⁹ CEDAW secara khusus melindungi terhadap diskriminasi berbasis gender.²⁰ India telah meratifikasi CEDAW pada tahun 1993 yang di dalamnya terdapat perlindungan terhadap wanita dari kekerasan dan praktek-praktek budaya, tradisi atau agama. Tindakan-tindakan praktik tradisi berbahaya menurut konvensi internasional yaitu;

- 1) Mutilasi dan pemotongan genital wanita
- 2) Perkawinan anak di bawah umur dan perkawinan paksa
- 3) Perawatan dan pengasuhan istimewa untuk anak laki-laki
- 4) Penelantaran dan pengabaian anak-anak yang terlahir cacat
- 5) Pembunuhan bayi perempuan
- 6) Pemaksaan peggemukaan bagi wanita muda dan pentabuan makanan bergizi bagi wanita hamil

¹⁴Ibid. Hal 17

¹⁵ Ibid. Hal 16

¹⁶ Ibid. Hal 18

¹⁷ Ibid. Hal 18

¹⁸Unwoman. CEDAW-Asia Pasifik. Diakses pada www.unwoman-asiapasifik.org

¹⁹Ibid

²⁰Ibid

- 7) Pembunuhan anak-anak korban ritual
- 8) Persembahan anak gadis perawan kecandi, kuil atau pendeta
- 9) Penggoresan, penatoan, pengikatan dan pencapan terhadap anak-anak, dan
- 10) Pembunuhan kehormatan, pembunuhan yang terkait dengan mahar.

Setelah terbentuknya konvensi tersebut, maka dibuatlah Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan dibentuk pada tahun 1982 dengan tugas utamanya yakni mempertimbangkan laporan periodik yang disampaikan kepada Komite dari Negara-negara Peserta mengenai langkah-tindak legislatif, yudikatif, administrative dan tindakan-tindakan lain yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Konvensi.²¹

Melihat kepada tindakan-tindakan yang dilarang, yang telah tercantum di dalam konvensi internasional maka tradisi yang terdapat di India seperti dowry murder merupakan tindakan diskriminasi dan hak asasi terhadap perempuan di India. Untuk itu maka pemerintah India meratifikasi CEDAW dan menerapkannya di India.

Pemerintah serta hukum yang ada di India seperti acuh tak acuh dalam menangani dan memberantas kasus pelanggaran HAM terhadap wanita di India. Oleh karena itu, dalam upaya memperjuangkan hak-hak wanita di India, terdapat beberapa aktivis yang ikut berkontribusi, antara lain Flavia Agnes dan Purnimo Rao. Kedua aktivis tersebut merupakan salah satu contoh para pejuang hak-hak wanita melalui strategi dan cara yang berbeda.

Flavia Agnes berjuang hak-hak wanita melalui gerakan-gerakan yang diberi nama "Majlis" dimana dia merasa bahwa pemerintah serta hukum tidak berjalan dengan efektif dalam memberantas kasus pelanggaran HAM pada wanita India. Flavia Agnes memulai gerakan membela hak-hak wanita dilatarbelakangi ketika ia merasa bahwa perempuan di India tidak berani membuka suara serta tidak memiliki

keberanian untuk melawan. Pelanggaran yang terjadi pada wanita di India tidak hanya berdampak pada dirinya sendiri namun juga berdampak jangka panjang terutama kepada anak-anaknya nanti. Perempuan yang diperkosa, dan mempunyai anak nantinya dia tidak akan fokus untuk merawat anaknya akibat dari trauma yang ia alami. Hal tersebut akan berdampak pada kehidupan anaknya kelak. Namun, dari gerakan yang telah dimulai oleh Flavia Agnes tersebut, setidaknya sedikit-demi-sedikit mulai membangkitkan rasa keberanian wanita-wanita India untuk mulai membuka suara dan melawan serta melaporkan tindakan-tindakan yang tidak pantas.

Jika Flavia Agnes berjuang untuk hak-hak wanita melalui gerakan-gerakan organisasi, maka Purnimo Rao menggunakan cara melalui perfilman yang ia tekuni. Purnimo Rao merasa bahwa gerakan-gerakan yang telah dilakukan oleh aktivis-aktivis lainnya juga tidak begitu berdampak signifikan dalam memberantas kasus pelanggaran HAM terhadap wanita. Purnimo Rao menggunakan cara yang unik dalam menyerukan suara untuk berjuang hak-hak wanita. Melalui karya-karya film yang ia buat dengan naskah dan alur cerita yang mengandung unsur-unsur ajakan untuk memperjuangkan hak wanita. Salah satu film yang dibuat oleh Purnimo Rao dalam menyerukan pembelaan pada hak-hak wanita yaitu film yang berjudul *India's Daughter*.

KESIMPULAN

Dowry Murder merupakan tradisi India yang seharusnya menghasilkan sisi positif dimana seorang Ayah ingin melindungi dan menjaga harkat dan martabat anaknya ketika akan menikah. Namun, dowry murder telah menjadi budaya yang negatif karena adanya ketimpangan sosial dan ekonomi yang masih mengakar dan membudaya di India yang menjadi suatu kebenaran. Segala bentuk kriminalitas yang terjadi terhadap wanita di India penyebab utamanya ialah *Dowry Murder*.

²¹Ibid

Pemerintah India telah melakukan berbagai cara untuk melindungi hak-hak perempuan di India, dengan didukung oleh organisasi Internasional dan aktivis-aktivis pejuang hak-hak perempuan di India dengan berlandaskan perspektif feminisme. Dimana pejuang feminisme mempertahankan kepercayaan mereka bahwa perempuan harus dilindungi serta memiliki kesetaraan dengan laki-laki (kesetaraan gender).

Dari data-data yang diperoleh terkait kasus dowry murder, baik itu catatan kriminal maupun bunuh diri telah membuktikan bahwa kasus Dowry Murder yang menjadi akar dari seluruh

tindakan kriminal pada perempuan di India, merupakan tantangan besar yang harus dihadapi oleh Pemerintah untuk menetapkan kebijakan yang terbaik dalam meminimalisir bahkan mengatasi kasus dowry murder sehingga dapat diterapkan secara efektif dan menyeluruh pada semua lapisan masyarakat. Kerjasama dari seluruh elemen baik itu Pemerintah, Organisasi Internasional, Lembaga-lembaga, maupun masyarakat menjadi sangat penting dalam upaya untuk mengatasi kasus dowry murder serta meluruskan kembali tujuan utama dari adanya budaya dowry murder di India.

of Gender and the Law, Vol. 6 (2).
(2000: 456).

DAFTAR PUSTAKA

Alifia L. 2017. *Kekerasan Terhadap Perempuan di Daerah Kumuh India*. Diakses dari www.doktermudaonpublichealth.com

C.S. Lakshmi. "On Kidneys and Dowry", *Economic and Political Weekly*, Vol.24

<<http://www.jstor.org/stable/4394309>> .
(1989:189).

Resen R. 2012. *Dowry Murder: Kekerasan Simbolik terhadap Perempuan di India*. Volume 7

Resen, Putu T K. 2012. *Kekerasan Terhadap Perempuan dan Keamanan Manusia (Studi kasus: Dowry Murder Di India)*.

S Ravikant, Namratha. "Dowry Deaths: Proposing A Standard for Implementation of Domestic Legislation In Accordance with Human Rights Obligations", *Michigan Journal*

Susanti. 2014. Diakses digilib.uinsby.ac.id/544/6/Bab%203.pdf

Tyar A, Sammy. *Pemikiran Feminisme dalam Hubungan Internasional*. Diakses dari https://www.academia.edu/3404285/Pemikiran_Feminisme_dalam_Hubungan_Internasional

Walanda S, Rosfita. 2012. *Praktek Diskriminasi Wanita Karena Budaya Di India*.

Unwoman. CEDAW-Asia Pasifik. Diakses pada www.unwoman-asiapasifik.org

National Crime Record Bureau, India, diakses pada ncrb.inc.in